

Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan

Oleh Hujair AH. Sanaky¹⁾

Abstrak

Profesionalisme guru, tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah:

Kompetensi profesional, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi; kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan;

Kompetensi Sosial, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat;

Kompetensi personal, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang *gaul* dan *"funky"* sehingga menjadi dambaan setiap orang, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat.

Penilaian terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja, tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks, menyangkut kemam-

puan profesional, personal, sosial termasuk perilaku dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru. Penilaian harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada bidang kependidikan.

Kata Kunci : *Sumber daya kependidikan yang berkualitas dan profesional*

Pendahuluan

Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era global ini, semua pihak perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Pihak-pihak yang ikut meningkatkan mutu pendidikan adalah pemerintah, masyarakat, stakeholder, kalangan pendidik serta semua subsistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun meningkatkan prestasi yang telah diraih.

Dari pihak yang disebutkan di atas, dalam pembahasan tulisan ini yang disoroti hanya masalah guru. Mengapa? Karena guru menjadi fokus utama dari kritik-kritik atas ketidaktercapaian mutu pendidikan. Namun

¹⁾ Drs. H. Hujair AH. Sanaky, MSI., Dosen FIAI dan Kepala LPM UII Yogyakarta

tidak dapat dipungkiri bahwa, pada sisi lain guru juga menjadi sosok yang paling diharapkan dapat mereformasi tataran pendidikan. Guru menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan di sekolah yang lebih baik (Naniek Setijadi, From: [http://tpj.bpkpenabur.or.id/.....](http://tpj.bpkpenabur.or.id/), akses, selasa, 26 April 2005, jam 10.15).

Menurut pandangan di atas, rasanya tidak mudah untuk menjadi guru dewasa ini, karena mereka menjadi fokus utama dari kritik-kritik permasalahan pendidikan di Indonesia. Menjadi guru berarti menggeluti profesi yang penuh dengan tantangan. Guru berhadapan dengan tuntutan kualitas profesi, amanah dari orang, masyarakat, stakeholder, pemerintah, karena guru dianggap menyandang akuntabilitas atas keberhasilan pembelajaran akademis-non akademis siswa.

Di sisi lain, guru juga berhadapan dengan tuntutan perubahan yang begitu cepat, seperti arus informasi, yang kini sangat mudah diakses melalui internet. Ini tentu akan mengubah aspek-aspek pendidikan konvensional yang selama ini ditekuni, kearah pendidikan modern yang lebih responsif. Hal ini tentu saja akan memaksa para guru untuk mengubah model dan metode belajar-mengajar yang selama ini ditekuni serta materi dan jenis atau model penugasan yang diberikan kepada murid.

Permasalahan guru di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan masalah mutu *profesionalisme* yang masih belum memadai. Hal ini jelas-jelas telah ikut mempengaruhi mutu

pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan nasional kita yang rendah, menurut beberapa pakar pendidikan, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya mutu guru itu sendiri, di samping tentu saja faktor-faktor yang lain seperti sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai masih kurang memadai..

Sebenarnya permasalahan guru di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif, yaitu menyangkut semua aspek yang terkait berupa kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya" (Purwanto, <http://www.pustekkom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>). Tetapi, setiap kali membedah mutu pembelajaran, guru selalu dijadikan "kambing hitam". Terlebih dengan mutu pendidikan Indonesia yang terus terpuruk dibanding negara tetangga (Kompas, 10 Maret 2004, dalam Naniek Setijadi, From: [http://tpj.bpkpenabur.or.id/...](http://tpj.bpkpenabur.or.id/), akses, selasa, 26/4/2005, jam10.15). Sekalipun sebenarnya telah dipahami bahwa sumber permasalahan pendidikan di Indonesia, bukan hanya pada persoalan guru saja, tetapi juga persoalan perhatian pemerintah dan masyarakat, dana, kurikulum, metodologi dan manajemen pendidikan.

Rendahnya kualitas tenaga kependidikan, merupakan masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, motivasi menjadi tenaga pendidik (guru) di kebanyakan sekolah-sekolah Islam selama ini dikarenakan dan dilandasi oleh faktor pengabdian dan keikhlasan. Sedangkan dari sisi kemampuan, kecakapan dan disiplin ilmu dikatakan masih rendah (Hujair,

2003: 226). Hal ini, kemudian menjadi salah satu penyebab penting rendahnya kualitas pendidikan Islam dan dengan sendirinya mengalami kesulitan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Dengan kenyataan ini, maka masalah pokok dalam pendidikan Islam pada dasarnya adalah masalah yang terkait dengan faktor kualitas tenaga guru (*Asep Saeful Mimbar* dan *Agus Sulthonie*, 25 Juli 2001).

Fazlur Rahman menyatakan bahwa Indonesia seperti juga halnya negeri-negeri Muslim besar lainnya, memang menghadapi masalah pokok dalam modernisasi pendidikan Islam. Persoalan pokok adalah masalah kelangkaan tenaga yang memadai untuk mengajar dan melakukan riset. Seharusnya ini dipahami dengan jelas sehingga tahu bagaimana memproduksi tenaga seperti itu (*Fazlur Rahman*, 1985:151). Pandangan ini, menjadi tantangan dan persoalan bagi pendidikan Islam di Indonesia yang sedang berusaha membangun kualitas sumber dayanya.

Tuntutan sumber daya pendidikan yang *berkualitas* dan *profesional*, menjadi suatu keharusan pada era global, informasi dan reformasi pendidikan. Indikator perubahan sekarang yang dapat diamati adalah sebagian guru mulai melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2. Sekolah-sekolah mulai menerapkan kurikulum baru yang lebih menekankan pada aspek kompetensi dan kebanyakan sekolah mulai berbenah diri menuju Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan otonomi luas pada sekolah. Dengan demikian, sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat" (*Mulyasa*, 2002:24).

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, menuntut adanya sumber daya (kepala sekolah, *guru*, dan tenaga administrasi) yang memiliki kemampuan profesional dan integritas dalam mengelola pendidikan. Pelaksanaan program-program pendidikan harus pula didukung oleh kepemimpinan yang demokratis dan profesional, guru-guru yang juga profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing, serta tenaga administrasi profesional dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Dalam laporan Bank Dunia (1999), menyebutkan bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan (persekolahan) di Indonesia adalah karena kurang profesionalnya para kepala sekolah sebagai menejer pendidikan di tingkat lapangan (*Hujair*, 2003:226).

Program peningkatan kemampuan sumber daya pendidikan berupa *training for trainers* atau kemampuan untuk belajar terus menerus untuk meningkatkan kualitas bagi para pendidik (guru), merupakan suatu fokus dan tuntutan yang perlu diperhatikan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pendidikan harus melakukan investasi secara periodik bagi para guru jika ingin tetap memimpin di dunia pendidikan, karena apabila gagal dalam investasi guru akan berakibat fatal (*Hujair*, 2003: 227), dalam persaingan merebut animo pengguna pendidikan sebagai pengakuan terhadap kualitas lembaga pendidikan tersebut.

Indikator pengakuan terhadap kualitas dan kemampuan guru, bukan hanya datang dari jalur struktural/jabatan dan bukan pula dari jenjang karir fungsional seperti asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar yang *rigid*. Tetapi *reward* dan *penghargaan* yang lebih besar akan lebih banyak diperoleh dari pengakuan dan penghargaan yang diberikan langsung oleh masyarakat, karena kemampuan akademik dan profesionalisme guru itu sendiri (Onno W. Purbo, 16 Mei 2002). Untuk itu, semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat profesional yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menilai kualitas dan kompetensi guru.

Tuntutan profesionalisme guru tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah: *Kompetensi profesional*, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi (kurikulum), kompetensi bidang pembelajaran (menguasai materi pelajaran), teknik dan metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan. *Kompetensi sosial*, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, mampu menyelesaikan masalah, pengabdian pada masyarakat. *Kompetensi personal*, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, komitmen pada tugas, berdisiplin tinggi, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang *gaul* atau "funky", sehingga menjadi dambaan setiap

orang, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat.

Profesionalisme Guru

Berbicara tentang profesional guru sangat komprehensif. Profesi guru harus dilihat dari kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik dan metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, komit pada tugas, dapat menjaga kode etik profesi, di sekolah ia harus menjadi *manusia model* yang akan ditiru siswanya, di masyarakat menjadi tauladan.

Dalam *Jurnal Education Leadership* (terbit Maret 1994), ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional, yaitu: *Pertama*, memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. *Kedua*, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. *Ketiga*, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. *Keempat*, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas dan *kelima*, seyogianya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya (P. Ruspendi, 2004, From: <http://www.pikiran-rakyat.com...>, akses, selasa 26/4/2005, jam 10.30).

Malcon Allerd, (*Kompas*, 12 September 2001) mengatakan, bahwa selain kelima aspek itu, sifat dan kepribadian guru amat penting artinya bagi proses pembelajaran adalah adaptabilitas, entusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati dan kerjasama yang baik. Guru juga dituntut untuk mereformasi pendidikan, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar di luar sekolah, perombakan

struktural hubungan antara guru dan murid, seperti layaknya hubungan pertemanan, penggunaan teknologi modern dan penguasaan iptek, kerja sama dengan teman sejawat antar sekolah, serta kerja sama dengan komunitas lingkungannya (P. Ruspindi, 2004).

Pandangan ini, menunjukkan bahwa betapa tingginya tuntutan profesionalisme guru. Tetapi apabila dilihat dari kondisi guru yang ada mulai dari aspek kemampuan, kesejahteraan dan fasilitas yang memadai, terasa sulit bagi guru untuk *survive* mengikuti tuntutan ini. Dengan demikian, profesionalisme guru tidak hanya berpulang pada guru itu sendiri, tetapi diperlukan *political will* dari pemerintah, berupa dukungan, penghargaan, perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui *in service training*.

Untuk lebih jelas, perlu dicermati perkembangan dan permasalahan dalam profesi guru, kompetensi penting profesi guru, dan upaya meningkatkan profesionalisme guru, yaitu:

a. Perkembangan dan Permasalahan Profesi Guru

Profesi guru adalah termasuk profesi yang tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada zaman prasejarah, proses belajar mengajar berlangsung melalui pengamatan dan dilakukan oleh keluarga (Purwanto, From: <http://www.pustekkom...>, akses, 14/2/2005). Proses pembelajaran dilakukan *one-to-one* dari rumah ke rumah

dan di tempat-tempat ibadah. Katakan saja, sistem dan model pembelajaran lebih bercorak individual, yaitu murid belajar secara individual pada guru satu-persatu. Tuntutan profesi guru juga mengikuti perkembangan dan model pembelajaran pada saat itu.

Pada saat sekarang ini, sejalan dengan perkembangan sistem persekolahan, maka profesi guru juga telah dan terus mengalami perubahan mengikuti tuntutan perubahan tersebut. Profesi guru pernah menjadi profesi penting dalam perjalanan bangsa ini dalam menanamkan nasionalisme, menggalang persatuan dan berjuang melawan penjajahan. Profesi guru pada zaman dulu bahkan merupakan profesi yang paling bergensi dan menjadi dambaan generasi muda saat itu.

Tetapi sayangnya, sejak beberapa dekade yang lalu hingga sekarang, profesi guru mulai dianggap kurang bergensi dan kinerjanya dinilai tidak optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Persoalan guru semakin menjadi persoalan pokok dalam pembangunan pendidikan yang disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan masyarakat dan perubahan global. Hingga kini persoalan guru belum pernah terselesaikan secara tuntas (Purwanto, <http://www.pustekkom...> akses, 14/2/2005).

Patut diakui, bahwa guru selalu diberikan beban dan tanggungjawab yang berat dalam

usaha mendidik anak bangsa, tetapi perhatian pada profesi mereka, seperti peningkatan kualitas melalui pelatihan, *in service training* profesi, *reward* dan *penghargaan*, belum diberikan secara memadai dan optimal. Namun para pengamat dan penilai pendidikan dengan kapasitas dan otoritas ilmunya, dengan mudah memberikan kritik terhadap guru yang dianggap kurang bergengsi, kinerjanya yang dinilai belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Tetapi solusi yang bersifat *action* belum optimal diberikan pada mereka dalam bentuk apapun, baik berupa pelatihan pada bidang pengetahuan dan keterampilan baru secara periodik ataupun yang lain-lainnya.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Suyanto memberikan contoh dengan perbandingan negara Singapura. Di negara ini, para guru selalu mendapatkan pelatihan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan oleh guru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap tahun mereka mendapatkan hak untuk memperoleh *in service training* selama 33 jam. Itulah sebabnya guru mereka selalu dapat dipertahankan profesionalismenya dan mutu pendidikan mereka, yang selalu menduduki peringkat kedua setelah Korea Selatan di antara 12 negara di Asia (Suyanto, 2004, From:<http://www.SuaraMerdeka.com>...., Selasa 26 April 2005,

jam.10.30).

Di era reformasi dan desentralisasi pendidikan saat ini, guru semestinya dapat lebih mendapatkan pemberdayaan, baik dalam arti profesi maupun kesejahteraan. Mengapa? Karena saat ini pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan yang terkait dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru tentu dapat langsung dipantau oleh pemerintah daerah (Suyanto, From:<http://www.SuaraMerdeka.com>).

Tetapi usaha keras itu belum terlihat secara nyata dilakukan oleh pemerintah, sementara guru selalu dihadapkan pada tuntutan profesionalisme dan harus mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat di masyarakat. Katakan saja, guru sekarang berhadapan dengan kondisi "*ekstrim*" yaitu akan terjadi percepatan ilmu pengetahuan melalui informasi internet dan media yang lain. Siswa atau mahasiswa, mungkin akan memiliki ilmu atau memiliki informasi yang lebih luas daripada gurunya.

Dengan demikian, guru tidak lagi dapat memaksa pandangan dan kehendaknya, karena mungkin para siswa atau mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang lebih dari informasi yang mereka peroleh. Sebab ilmu pengetahuan akan terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran dan pandangan yang tersosialisasi melalui media informasi internet dan media

informasi lainnya (Hujair, 2004: 95). Misalnya saja, kalau dulu siswa hanya menerima materi dari sumber tunggal, yakni guru, tetapi kini siswa akan menerima materi dari banyak sumber. Guru, bukan lagi satu-satunya sumber belajar, karena siswa dapat belajar dari siapa saja dengan bahasa yang mereka kuasai (Mastuhu, 1999 : 34).

Sekarang ini, siswa dapat belajar dari internet, *cd-rom*, media masa, dan media lain, yang akan menjadi pusat kegiatan belajar mandiri. P. Ruspendi, seorang guru SMA Pasundan Majalaya, Jawa Barat, menceritakan tentang bagaimana seorang guru di Jakarta yang harus mengajar anak-anak orang kaya. Murid-murid yang diajarnya sudah dapat menggunakan komputer, internet, bahasa Inggris, dan berwawasan luas, karena orang-tuanya langganan banyak koran/majalah, dan akibatnya sang guru tersebut merasa *minder* (P.Ruspendi, 2004).

Berdasarkan cerita ini, maka mau tidak mau, senang tidak senang, siap tidak siap, guru harus mengikuti tuntutan perubahan yang berlangsung di sekitarnya. Bila tidak, maka guru akan terpinggirkan dalam percaturan era perubahan saat ini. Oleh karenanya, untuk menghadapi semua tantangan ini, kemampuan profesional guru harus teruji. Guru tidak cukup hanya dengan penguasaan materi mata pelajaran saja, tetapi guru diharapkan bertanggungjawab atas pengembangan profesinya

secara terus-menerus, tidak "gaptek" (gagap teknologi). Tetapi guru harus benar-benar menguasai teknologi pembelajaran termasuk penggunaan komputer dan teknologi lainnya untuk proses belajar mengajar dan pengembangan profesi (Naniek Satijadi, 2004, From: <http://tpj.bpkpenabur.or.id...>, akses, Selasa, 26/4/2005, jam 10.15).

Jelasnya, guru di zaman sekarang harus menguasai kemampuan akademik, paedagogik, sosial dan budaya, teknologi informasi, mampu berpikir kritis, mengikuti dan tanggap terhadap setiap perubahan serta mampu menyelesaikan masalah-masalah di sekitar profesinya. Guru tidak hanya datang ke sekolah melulu untuk mengajar saja sebagai tugas kedinasan, rutinitas dan kemampuan untuk mengelola kelas saja, karena itu tidak cukup lagi. Tetapi, guru diharapkan dapat menjadi pemimpin dan sebagai agen perubahan yang mampu mempersiapkan anak didik agar siap menghadapi tantangan perubahan global dan era informasi di luar sekolah (Naniek Satijadi, 2004).

Profesi guru di abad 21 ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Guru dengan kemampuan *artifisialnya* dapat membelajarkan siswa dalam jumlah besar, bahkan dapat melayani siswa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Guru bukan lagi hanya mengendalikan siswa yang belajar di kelas, tetapi ia mampu

membelajarkan jutaan siswa di "kelas dunia" dan memberi pelayanan secara individual pada waktu yang bersamaan. Melalui bantuan *teknologi informasi internet* pembelajaran dapat dilakukan secara *multiakses* dan memberi layanan secara individual di mana saja, kapan saja dan di tempat di mana mereka berbeda (Purwanto, <http://www.pustekkom.go.id>).

Artinya, dengan teknologi informasi internet, ilmu pengetahuan dapat di transmisikan pada kecepatan tinggi. Tuntutan kemampuan dan kesempatan untuk mengakumulasi, mengolah, menganalisis, mensintesa data menjadi informasi, kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sangatlah penting artinya dalam dunia informasi saat ini (Hujair, 2004:91). Kondisi ini, akan berpengaruh pada kebiasaan dan budaya guru yang selama ini dilakukan. Sebab, ilmu pengetahuan akan tersebar dimana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan karena diperoleh melalui sarana internet dan media informasi lainnya.

Paradigma di atas lebih dikenal sebagai *distributed intelligence* atau *distributed knowledge*. Dengan paradigma ini, tampaknya fungsi guru-dosen di lembaga-lembaga pendidikan, akan beralih dari sebuah sumber ilmu pengetahuan menjadi "mediator" dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka proses *long life learning* dalam

dunia informal yang sifatnya lebih *learning based* daripada *teaching based*, akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Pada posisi ini, peran *web*, *Homepage*, *Search Engine* dan *CD-ROM*, tentu akan merupakan alat bantu yang akan mempercepat proses distribusi *knowledge* (Onno W. Purbo, 2000, Form: <http://www.detik.com/onno/jurnal/2004/aplikasi/pendidikan/p-t9.shtml>). Tuntutannya, para guru harus benar-benar memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyesuaikan, mengakses dan dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagai media pembelajaran.

Dapat dikatakan bahwa persoalan guru di Indonesia sangat terkait dan terletak pada masalah-masalah kualifikasi yang rendah, kemampuan profesional, pembinaan yang terpusat, perlindungan profesi yang belum memadai dan penyebarannya yang tidak merata sehingga menyebabkan kekurangan guru di beberapa lokasi. Segala persoalan guru tersebut timbul oleh karena adanya berbagai sebab dan masing-masing saling mempengaruhi (Purwanto, <http://www.pustekkom....lbid>).

Dengan demikian, permasalahan guru, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat terkait dengan mutu profesionalisme guru yang dianggap belum optimal. Oleh karena itu, permasalahan guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut semua aspek yang

terkait yaitu aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru dan fasilitas.

b. Kompetensi Penting Profesi Guru

Profesionalisme guru dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah kompetensi bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan serta kompetensi bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat. Pengembangan profesionalisme guru meliputi peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja (*performance*) dan kesejahteraan-nya. Guru sebagai profesional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, wawasan dan kreativitasnya" (*Purwanto*, <http://www.pustekkom>.) masing-masing yang saling mempengaruhi. Depdiknas, pada tahun 2001 lalu merumuskan beberapa kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti kompetensi kepribadian, bidang studi, dan pendidikan dan pengajaran (*Paul Suparno*, 2004:47).

Masyarakat dan orangtua murid telah mempercayakan sebagian tugasnya kepada guru. Tugas guru menjadi cukup mulia dan berat, karena dari limpahan

tugas masyarakat tersebut, guru dengan segenap kemampuannya harus mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dalam arti luas, keterampilan menjalani kehidupan (*life skills*), nilai-nilai (*value*) dan *beliefs* (*Purwanto*, <http://www.pustekkom>..., *Ibid*). Dari *life skills* ini, guru diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi proses pembelajaran yang didasarkan pada *learning competency*, sehingga outputnya jelas.

Dari sini, guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengembangkan dan membangun tiga pilar keterampilan, yaitu : (1) *Learning skills*, yaitu keterampilan mengembangkan dan mengolah pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat. (2) *Thinking skills*, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan masalah secara optimal. (3) *Living skills*, yaitu keterampilan hidup yang mencakup kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada daya juang, tanggungjawab dan kepekaan sosial yang tinggi (*Sudjarwadi*, KR, 5-1-2003)

Selain itu, guru sebagai pendidik, bukan hanya mampu mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi guru juga dilimpahkan tugas padanya untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan. Apabila dicermati, sungguh berat tugas guru, tetapi penghargaan pada profesi ini

kurang optimal dan selalu dinilai kinerjanya rendah. Apapun itu semua, mau tidak mau, guru harus memiliki kompetensi yang optimal dalam usaha membimbing siswa agar dapat siap menghadapi kenyataan hidup (*the real life*) dan bahkan mampu memberikan contoh tauladan bagi siswa, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan dan menjadi dambaan setiap orang.

Guru akan berhadapan dengan persoalan yang serius yaitu sekolah akan berubah dari format kelas menjadi sekolah bersama dalam satu kota, sekolah bersama dalam satu negara, bahkan bersama di dunia atau sekolah global. Dengan kemajuan teknologi informasi, sekolah bersama yang diikuti oleh siswa dalam jumlah besar tersebut dapat terlaksana. Indikator ini, terbukti dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini sudah mampu meraih semua titik yang terpencil sekalipun dan masyarakat mulai belajar serta mendapatkan informasi dan ilmu dari berbagai sumber seperti radio, televisi, komputer internet, media masa dan media yang lain.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, sekolah sebagai institusi pendidikan mungkin saja dapat tergeser perannya dan sudah tidak menjadi sumber informasi satu-satunya, bahkan bukan lagi menjadi pencetus sumber informasi yang mutakhir, bila tidak memiliki daya adaptasi yang sesuai dengan kemajuan. Oleh

karenanya, kata kuncinya adalah "*harus berubah*", karena apabila tanpa adanya kesadaran untuk malakukan perubahan, maka perkembangan kemajuan dunia akan menjadi ancaman yang menjadikan sekolah sebagai lembaga usang (*Winarno Surakhmad*, From: <http://www.Bpk.penabur.or.id>).

Kondisi pembelajaran yang disebutkan di atas, akan berpengaruh pada rutinitas kehadiran guru secara fisik di kelas. Artinya, kehadiran guru secara fisik dalam ruangan yang di sebut kelas, mungkin tidak lagi menjadi keharusan dan yang menjadi keharusan adalah adanya perhatian dan aktivitas secara mandiri terhadap sesuatu persoalan yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi interaktif. Sejalan dengan perubahan format belajar klasikal ke belajar bersama secara global tapi mandiri tersebut, dapat dipastikan bahwa peran guru juga akan berubah. Selain itu, peran guru di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan desentralisasi dan atau otonomi pendidikan.

Dari kondisi ini, maka kemampuan guru di masa depan, dituntut harus menguasai dan mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Guru harus berubah peran menjadi fasilitator yang membelajarkan siswa sampai menemukan sesuatu (*scientific curiosity*), bersikap demokratis serta menjadi profesional yang mandiri dan otonom (*Purwanto*, <http://www.pustekkom.go.id>...

Ibid). Proses pembelajaran lebih terfokus pada *outcomes competency* dan peningkatan relevansi dengan kebutuhan masyarakat (Hujair, 2003:199). Peran guru yang seperti itu tentu sejalan dengan era masyarakat madani (*civil society*) yaitu masyarakat demokratis, plural, taat hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Dari paparan di atas, muncul pertanyaan, apakah kompetensi profesi yang harus dimiliki seorang guru?. Kompetensi penting yang harus dimiliki profesi guru adalah:

Pertama, kompetensi pada bidang studi dan pendidikan/pengajaran, yaitu mengharuskan guru untuk menguasai kurikulum, menguasai materi pelajaran, menguasai teknik dan metode mengajar. Kemampuan pada bidang studi, yaitu menuntut pemahaman pada karakteristik dan isi bahan ajar, menguasai konsepnya, mengenal betul metodologi ilmu tersebut, memahami konteks ilmu tersebut dengan masyarakat, lingkungan dan dengan ilmu lain. Jadi, guru tidak cukup hanya mendalami ilmunya sendiri, tetapi bagaimana dampak dan relasi ilmu tersebut dalam kehidupan masyarakat dan dengan ilmu yang lain (Paul Suparno, 2004: 51). Dengan demikian, guru diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sedangkan kemampuan guru dalam bidang pembelajaran yaitu memiliki pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya,

mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan siswa, menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik (Paul Suparno, 2004: 52).

Kedua, kompetensi sosial, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, dapat berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, pengabdian pada masyarakat.

Ketiga, kompetensi personal atau kepribadian yang mencakup aktualisasi diri, kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang hayat (Depdiknas, 2001, dalam Paul Suparno, 2004: 47), mengikuti perubahan, komitmen pada tugas, berdisiplin tinggi, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang *gaul* dan *"funky"* sehingga menjadi dambaan setiap orang, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan masyarakat.

Tuntutan ke depan, guru harus diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembang. Dengan begitu maka dapat dipastikan bahwa profil kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa, yang dimulai dari kemampuan

menganalisis, merencanakan atau merancang, mengembangkan, dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan.

Kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai guru, dituntut untuk selalu diaktualisasi dalam kehidupannya. Misalnya saja, kemampuannya dalam merencanakan pembelajaran dan merumuskan tujuan, mengelola kegiatan individu, menggunakan multi metoda, dan memanfaatkan media, berkomunikasi interaktif dengan baik, memotivasi dan memberikan respons, melibatkan siswa dalam aktivitas. Selanjutnya mengadakan penyesuaian dengan kondisi siswa, melaksanakan dan mengelola pembelajaran, menguasai materi pelajaran, memperbaiki dan mengevaluasi pembelajaran, memberikan bimbingan, berinteraksi dengan sejawat dan bertanggungjawab kepada konstituen serta mampu melaksanakan penelitian (Purwanto; <http://www.pustekkom...>, Ibid).

Untuk dapat mengelola pembelajaran yang efektif, guru harus senantiasa belajar dan meningkatkan keterampilan dasarnya dalam mengajar. *Rosenshine* dan *Stevens*, mengemukakan bahwa sembilan keterampilan dasar mengajar yang penting dikuasai guru, yaitu keterampilan membuka pembelajaran dengan mereview secara singkat pelajaran terdahulu yang terkait dengan pelajaran yang akan diajarkan, menyajikan tujuan

pembelajaran, menyajikan materi dalam langkah-langkah kecil dan disertai latihannya masing-masing, memberikan penjelasan dan keterangan yang jelas dan detail, memberikan latihan yang berkualitas, mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahamannya, membimbing siswa menguasai keterampilan atau prosedur baru, memberikan latihan dan koreksi, memonitor kemajuan siswa (dalam Purwanto, <http://www.pustekkom...>, Ibid).

Selain itu, guru harus melibatkan siswa dalam upaya merumuskan konsep mata pelajaran yang diajarkan, merumuskan tujuan pembelajaran atau *learning objective*, merumuskan materi-materi pembelajaran. Demikian pula tentang buku atau referensi yang digunakan, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan, dan sistem penilaian yang digunakan yang memerlukan komunikasi terlebih dahulu dengan siswa.

Dengan demikian, langkah-langkah dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, *pertama*, guru harus menguasai kemampuan-kemampuan dan keterampilan dasar pembelajaran secara baik. *Kedua*, guru berusaha meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan dalam bidang keterampilan baru yang diperlukan guru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, harus mau membuat

penilaian atas kinerjanya sendiri atau mau melakukan otokritik terhadap kinerjanya sendiri. *Keempat*, kritik yang membangun, pendapat dan berbagai harapan masyarakat harus menjadi perhatian sebagai upaya perbaikan kinerja guru. *Kelima*, guru harus berusaha memperbaiki profesionalismenya sendiri dan masyarakat hanya membantu mempertajam dan menjadi pendorong untuk meningkatkan profesi guru.

c. Upaya Guru Meningkatkan Profesionalisme

Suyanto, menyatakan bahwa banyak program pendidikan baru yang inovatif diberlakukan oleh pemerintah dalam waktu paling tidak lima tahun terakhir ini, seperti *broad based education, life skills*, manajemen pendidikan berbasis sekolah, *contextual teaching-learning (CTL)*, evaluasi belajar model portofolio, dan yang terakhir Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian disebut Kurikulum 2004. Namun dalam perumusan semua ini kurang atau bahkan tidak melibatkan guru sebagai variabel penting dalam pelaksanaan program-program itu. Padahal semua program baru itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini.

Lantas, bagaimana peran guru kita dalam pembaharuan dan inovasi pendidikan?. Inilah persoalannya. Dengan banyaknya program baru itu, semestinya para guru didorong untuk memiliki profesionalisme yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan kualitas guru, seharusnya juga diikuti dengan kesejahteraan yang lebih memadai. Tetapi kenyataan tidaklah seperti itu dan banyaknya program baru itu justru menambah beban kerja guru (Suyanto, 2004, From:<http://www.SuaraMerdeka.com...>, Ibid).

Lebih lanjut Suyanto menyatakan, bahwa pengaggas pembaharuan pendidikan harus memiliki asumsi bahwa guru dengan serta merta dapat melakukan apa saja yang menjadi program pembaharuan yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, asumsi inilah yang tidak benar. Sebab, kenyataannya guru harus mendapatkan *retraining* yang memadai dan tersistem untuk dapat melakukan berbagai pembaharuan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat kembali kemampuan riil yang dimiliki guru untuk melakukan atau mengadopsi setiap inovasi dibidang pendidikan (Suyanto, 2004, From:<http://www.SuaraMerdeka.com...>, Ibid).

Oleh karenanya, segenap upaya peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya harus terpulang dan ditentukan oleh para guru itu sendiri serta harus sudah dimulai ditegaskan sejak awal masa rekrutmen. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum PGRI, Muhammad Surya, bahwa pengembangan profesionalisme guru seharusnya sudah dimulai sejak masa rekrutmen. Selain itu, perlu pula didukung dengan

fasilitas kebutuhan guru yang memadai tentang kelengkapan sarana untuk pelaksanaan tugasnya. Perbaikan kesejahteraan guru merupakan agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan (*Kompas*, 30 Januari 2003).

Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, maka guru sendiri juga harus selalu berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu (1) persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, (2) sebagai tenaga profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang baik, (3) untuk memenuhi standar profesi ini, guru harus belajar secara terus menerus sepanjang hayat, (4) guru harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

Kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan dan dengan terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru memiliki posisi tawar yang kuat, karena memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan pula dengan membina jaringan kerja atau *networking*. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses, sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui *networking* inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses sosial yang lainnya.

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan. Ini merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini karena semua sektor dan bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa pendidikan. Dalam hal ini, gurupun harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasanya yaitu siswa, orangtua dan sekolah sebagai *stakeholder*. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas

dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru senantiasa tidak ketinggalan, tidak gagap teknologi, dalam mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan menggunakan LCD dan komputer (*hard technologies*) dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan (*soft technologies*) (Purwanto, <http://www.pustekkom...>, Ibid), menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Sebab, perkembangan teknologi informasi dan internet merupakan faktor pendukung utama percepatan yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu juga akan berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk profesi guru dalam menjalankan tugasnya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta perubahan masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan era reformasi pendidikan akan menghasilkan suatu tekanan atau *pressure* dan tuntutan terhadap profesionalisme guru. Ini akan mencakup dalam mendayagunakan teknologi komunikasi informasi, termasuk dalam hal pertanggungjawaban atau akuntabilitas profesinya, karena profesi guru termasuk profesi yang kompetitif dan bergerak dalam kepentingan publik.

Dengan demikian, guru harus siap dan bersedia untuk diuji kompetensinya secara berkala

untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembang. Sebab, di masa depan dapat dipastikan bahwa profil kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa yang dimulai dari merencanakan atau merancang, menganalisis, mengembangkan, mengimplementasikan dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan.

Persoalan Sertifikasi Guru

Masalah mutu profesionalisme guru yang dinilai masih belum memadai seperti yang dikemukakan di atas, maka tentu diperlukan upaya serius untuk peningkatannya. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu upaya penilaian terhadap kinerja guru secara berkala untuk menjamin agar kinerja guru tetap memenuhi syarat profesionalisme. Tampaknya, Menteri Pendidikan Nasional, akan men-canangkan guru yang profesional. Tetapi, wacana yang mencuat ini terkait dengan rencana kebijakan tersebut adalah *sertifikasi* dan *uji kompetensi guru*, sebagai suatu wujud langkah untuk meningkatkan kualitas guru.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, tampaknya pemerintah memandang perlu untuk membentuk sebuah badan *independen profesi guru* yang akan menilai profesionalisme guru. Badan tersebut, nantinya akan mengeluarkan *sertifikat* bagi para guru yang dinilai memiliki *kompetensi* atau memenuhi persyaratan sebagai guru. Rencana tersebut, akan dikuatkan dengan keputusan presiden

dan kini sedang digodok oleh tim kecil yang terdiri dari unsur Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (*Kompas*, Rabu, 24 November 2004).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa badan independen tersebut nantinya berada di luar LPTK dan anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang memiliki kepedulian dan integritas untuk itu dapat menilai dan menjaga kewibawaan profesi guru. Badan tersebut mewakili *stakeholder* atau kepentingan publik, mulai dari pengguna, penyedia, pengatur, dan pengawas tenaga kependidikan. Lebih lanjut dijelaskan pula, bahwa program dan penetapan kelulusan pendidikan profesi, juga ditentukan oleh badan profesi tersebut dan akan disusun persyaratan sehingga tidak semua LPTK dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut (*Kompas*, 24 November 2004).

Kebijakan yang demikian, tentu akan berdampak serius pada lembaga-lembaga pendidikan yang memproduksi tenaga keguruan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang *berkualifikasi* sajalah yang dapat dibenarkan untuk mendidik para calon guru. Para calon guru harus mencapai gelar sarjana dahulu baru kemudian *mengambil profesi guru* dan untuk menjaga kualitas profesi guru direncanakan *semacam lisensi guru* yang tidak berlaku selamanya, tetapi harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. *Lisensi* guru dapat dicabut jika guru tersebut membuat

kesalahan atau melanggar kode etik profesinya (*Kompas*, 24 November 2004).

Kebijakan ini, perlu dihargai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, karena kebijakan tersebut untuk mengangkat harkat dan wibawa guru. Sasarannya supaya mereka lebih dihargai oleh pemakai tenaga profesi ini dan tentunya juga akan diikuti dengan standar gaji dan penghargaan yang layak bagi guru yang memiliki sertifikat tersebut.

Tetapi, dalam kebijakan tersebut ada hal yang perlu dicermati yaitu "*badan independen sertifikasi guru*" tersebut berada di luar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Artinya anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang diambil dari unsur-unsur yang "tidak berprofesi guru", tetapi memiliki kepedulian dan integritas untuk dapat menilai dan menjaga kewibawaan guru. Hal ini, tentu akan menjadi tantangan dan persoalan serius bagi orang yang memiliki profesi guru itu sendiri dan mungkin juga guru yang sekarang sudah mengajar akan dinilai ulang oleh lembaga tersebut.

Namun suatu hal yang sangat ironis sekali, guru-guru akan dinilai oleh "*badan independen sertifikasi guru*" yang tidak memiliki kompetensi kependidikan. Dr. Abdorrahman Gintings, pengamat pendidikan dari Universitas Buya Hamka (Uhamka) menyatakan, bahwa sungguh sangat tidak profesional jika masyarakat terkait (guru dan pengelola pendidikan) tidak diajak bicara dan juga tidak tepat jika nantinya keanggotaan badan *independen*

sertifikasi guru dapat diambil dari unsur-unsur yang tidak *berprofesi guru* yang kelak mengeluarkan sertifikasi bagi guru yang dianggap kompeten (*Kompas*, 26 Nopember 2004).

Penilaian terhadap profesi guru mungkin dapat dilakukan oleh badan tersebut dengan baik, tetapi hasilnya mungkin kurang valid dan akurat, karena kemampuan guru dinilai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang kependidikan dan keguruan. Penilaian terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja, tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks yaitu menyangkut dengan kemampuan profesional, personal, sosial, termasuk perilaku dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru.

Abdorrahman Gintings, mencontohkan bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang medis, tetapi dia bukan dokter, tetap tidak pantas ikut menyertifikasi profesi dokter (*Kompas*, 26 Nopember 2004). Begitu juga sertifikasi guru, bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang pendidikan, tetapi dia bukan berprofesi sebagai guru, maka tidak pantas ikut menyertifikasi profesi guru. Guru yang setiap harinya menggeluti profesinya dalam proses belajar mengajar dan tahu betul tentang prinsip-prinsip keguruan yang memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan untuk profesinya itu, pantas dan layak dilibatkan dalam "badan independen sertifikasi guru" untuk melakukan sertifikasi terhadap guru dan bukan dari unsur-unsur yang tidak memiliki profesi sebagai guru.

Menurut Abdorrahman, jika kebijakan ini dipaksakan, maka pemerintah bakal melecehkan dan mengusik nurani 2,2 juta guru di Indonesia. Untuk itu, jangan sampai kebijakan tentang guru yang sifatnya fundamental ditetapkan terburu-buru dan sepihak tanpa melibatkan masyarakat guru itu sendiri (*Kompas*, 26 Nopember 2004). Kemampuan guru dalam upaya mendidik jangan disederhanakan dengan kemampuan mengajar saja, sehingga dapat dinilai sepintas oleh siapa saja. Tetapi, mendidik bukan sekedar membutuhkan pemahaman tentang materi pelajaran, tetapi juga melibatkan hati dan nurani dalam wujud interaksi antara guru dan murid, karena mendidik membutuhkan penjiwaan.

Rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan dan selalu mendapatkan julukan "pahlawan tanpa tanda jasa". Namun pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi, tapi dipandang baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau universitas keguruan eks IKIP diberdayakan untuk melakukan sertifikasi guru. Lembaga-lembaga kependidikan yang menyelenggarakan program Akta IV sebagai upaya untuk sertifikasi guru perlu ditingkatkan kualitas, sehingga memiliki kualifikasi untuk dapat mendidik para calon guru.

Penutup

Permasalahan guru harus diselesaikan secara komprehensif dan menyangkut semua aspek yang terkait